LAMPIRAN XLIV
KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 100.3.3.2/ 350 /K/411.013/2025
TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025

PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN PRAMBON KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang dituangkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah menerjemahkan secara operasional perencanaan jangka menengah daerah dan perencanaan tahunan daerah ke dalam rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, serta lokasi dan pendanaan indikatif. Selain itu, Renja Perangkat Daerah menjembati rencana strategis ke rencana operasional ke dalam langkah kebijakan tahunan yang lebih konkrit dan terukur untuk memastikan tercapainya target kinerja rencana strategis jangka menengah.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 perlu dilakukan perubahan mengingat berdasarkan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 pada pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan yang meliputi:

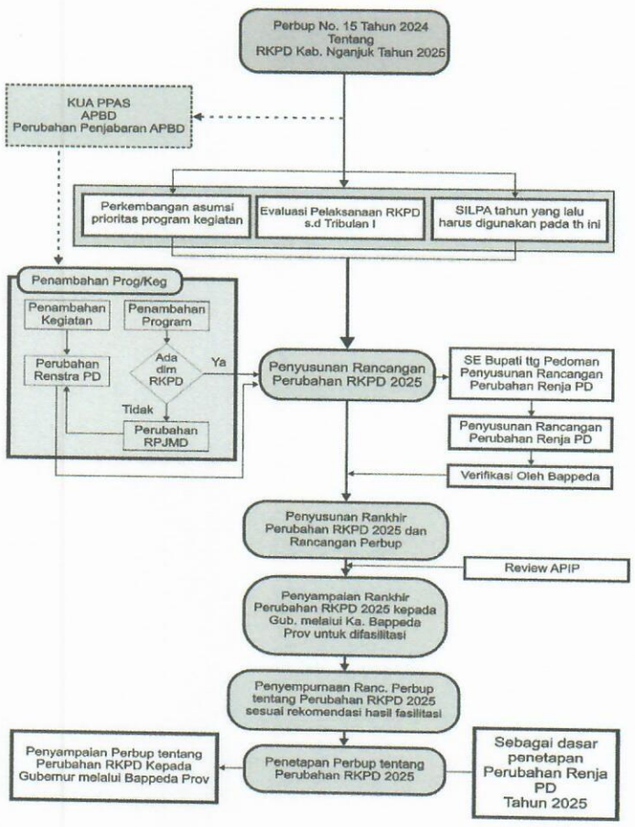
a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, serta rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renja Perangkat Daerah berkenaan;
b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun anggaran berjalan; dan/atau
c. Adanya kebijakan Nasional dan Provinsi yang mewajibkan perubahan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah untuk diakomodir dalam Perubahan Renja Perangkat Daerah.

Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 mempedomai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan tahapan meliputi: (1) evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I; (2) penyusunan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025; (3) penyusunan rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025; dan (4) penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025, secara diagramatik diilustrasikan dalam gambar berikut

Gambar 1.1.

Diagram Alir Perubahan Renja Perangkat Daerah



Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan Perubahan RKPD serta didasarkan pada pengendalian dan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah sampai Triwulan I tahun berkenaan dan evaluasi kinerja terhadap akhirnya Perubahan Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) untuk penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD).

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah:

Dasar Hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730)
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 20 15 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OI4 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UndangUndang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
10. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2023 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 173);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 630);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2008 Nomor 04);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 03 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2012 Nomor 01);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2010 Nomor 09) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pembentukan

dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 8);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 Nomor 2);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 1);
24. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 7);
25. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 9);
26. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025.
27. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 20 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025.
28. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati nomor 20 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 dimaksudkan sebagai penyesuaian rencana program dan kegiatan Perangkat Daerah terhadap perkembangan keadaan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2025.

1.3.2. Tujuan

Tujuan Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 adalah:

a. Menetapkan perubahan program dan kegiatan Perangkat Daerah berdasarkan hasil analisis dari evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Triwulan I Tahun 2025;
b. Mengakomodir Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah pergeseran APBD yang ditetapkan dalam Perubahan Penjabaran APBD;
c. Menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2025.
d. Sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan bagi Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025, disajikan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1.Latar Belakang;
- 1.2.Landasan Hukum;
- 1.3.Maksud dan Tujuan; dan
- 1.4.Sistematika Penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
- 2.3. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK
- 3.1. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
- 3.2. Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2025 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pada tahun 2025 telah melaksanakan 6 (enam) program utama yang tercantum dalam Penetapan Kinerja yang terdiri dari 14 Kegiatan dan 32 Sub Kegiatan.

Hasil evaluasi pelaksanaan kinerja Kecamatan PRAMBON Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 ditunjang dengan Belanja Operasi dan Belanja Modal sebesar Rp 2.962.128.159,00, terinci atas:

Belanja Operasi sebesar Rp 2.857.387.650,- terdiri atas :

a. Belanja Pegawai Rp 2.103.190.968,00

b. Belanja Barang dan Jasa Rp. 754.196.682,00

Belanja Modal sebesar Rp 104.740.509,-

a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp 104.740.509,00

b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp. 0,-

Adapun serapan Anggaran per Program Kegiatan adalah sebagai berikut :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Hasil program ini adalah meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Kecamatan Prambon, dengan anggaran Rp. 2.670.610.560,00 terealisasi Rp 2.462.743.409,00 atau 92,22%.

2) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Hasil program ini adalah meningkatnya prosentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan yang ditindaklanjuti, dengan anggaran Rp 146.899.550,00 realisasi Rp. 82.756.500,00 atau penyerapan dana sebesar 56,34 %

3) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Hasil dari program ini adalah meningkatnya Persentase Desa yang menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik, dengan anggaran Rp. 111.523.561,00 realisasi Rp. 106.594.750,00 atau penyerapan anggaran sebesar 95,58 %

4) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Hasil dari program ini adalah meningkatnya Prosentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dibidang ketentraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti, dengan anggaran sebesar Rp 51.082.000,00 realisasi Rp 42.187.000,00 atau penyerapan anggaran sebesar 82,59 %

5) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Hasil program ini adalah meningkatnya Prosentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dibidang pemerintahan umum yang ditindaklanjuti, dengan anggaran Rp 85.489.300,00 realisasi Rp 66.350.000,00 atau penyerapan dana sebesar 77,61 %.

6) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Hasil program ini adalah meningkatnya Persentase Desa yang menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik, dengan anggaran Rp 246.859.600,00 realisasi Rp 201.496.500,00 atau penyerapan dana sebesar 81,62 %

Evaluasi Hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Tri Bulan I Tahun 2025 mengacu pada APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025
Kabupaten Nganjuk
Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Prambon

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)/ Subkegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)					Kinerja dan Anggaran Renja Perangkaqt Daerah Tahun Target berjalan (Tahun N yang dievaluasi)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan 1		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja Tahun Berjalan yang di evaluasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan yang dievaluasi(%)		Unit Perangkat Daerah Penanggunjawab
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Tingkat Realisasi (%) Tahun 2024										
1	2	3	4	5		6		7		8		9	10		11		12		13		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP Kecamatan**	**82 Nilai**	**7.575.970.000**	**80,2**	2.076.818.170,00	**80,2 Nilai**	3.022.287.039	75,45	2462743409		**80,2 Nilai**	3.022.287.039		265.994.221,00		265.994.221			PRAMBON
	Meningkatkan ketentraman dan ketertiban di wilayah kecamatan	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi**	**3 Dokumen**	**4.000.000**	**3 Dokumen**	2.652.166,00	3 Dokumen	**12.300.089**	3 Dokumen	8.642.000		3 Dokumen	**12.300.089**	-	0,00	-	-			PRAMBON
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah (Kecamatan Prambon)	**3 Dokumen**	2.000.000	**3 Dokumen**	1.827.166,00	2 Dokumen	9.873.000	2 Dokumen	6.324.000		2 Dokumen	9.873.000	2	0,00	**2**	0,00			PRAMBON
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	**1 Laporan**	2.000.000	**1 Laporan**	825.000,00	1 Laporan	2.427.089	1 Laporan	2.318.000		1 Laporan	2.427.089	1	0,00	**1**	0,00			PRAMBON
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**44 Dokumen**	**2.217.524.000**	**44 Dokumen**	1.850.586.591,00	44 Dokumen	**2.420.214.150**	44 Dokumen	2.046.470.968		**44** Dokumen	**2.420.214.150**	8	**228125241**	**8**	228.125.241			PRAMBON
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerimaa gaji dan tunjangan ASN	15 Orang/Bulan	2.213.524.000	22 Orang/Bulan	1.850.586.591,00	15 Orang/Bulan	2.413.524.000	22 Orang/Bula	2.037.830.968		15 Orang/Bulan	2.413.524.000	15 Orang/Bulan	228.125.241	15 Orang/Bulan	228.125.241			PRAMBON
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	2.000.000	5 Laporan	0,00	4 Laporan	3.376.950	5 Laporan	6.040.000		4 Laporan	3.376.950	3 laporan	0,00	3 laporan	0,00			PRAMBON
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	5 Laporan	2.000.000	5 Laporan	0,00	5 Laporan	3.313.200	69 Laporan	2.600.000		5 Laporan	3.313.200	3	0,00	3	0,00			PRAMBON
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**2 Kegiatan**	26.000.000	**2 Kegiatan**	18.600.000,00	2 dokumen	31.880.000	2 Kegiatan	6.385.000		2 dokumen	31.880.000	2	0,00	**2**	0,00			PRAMBON
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	**17 Paket**	17.000.000	**17 Paket**	17.000.000,00	17 Paket	17.000.000	17 Paket	-		17 Paket	17.000.000	-	0,00	0	0,00			PRAMBON
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	**40 Orang**	9.000.000	**40 Orang**	1.600.000,00	40 Orang	14.880.000	40 Orang	6.385.000		40 Orang	14.880.000	-	0,00	-	0,00			PRAMBON
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**187 Dokumen**	**58,300,000**	**187 Dokumen**	37.719.715,00	187 Dokumen	**149.695.750**	187 Dokumen	68.423.887		187 Dokumen	**149.695.750**	62	**6.370.980**	**62**	6.370.980			PRAMBON
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket	5.000.000	7 Paket	495.000,00	7 Paket	5.894.400	7 Paket	2.900.000		7 Paket	5.894.400	1	1.450.000	1	1.450.000			PRAMBON
		Penyedia Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	8 Paket	5.000.000	8 Paket	0,00	8 Paket	9.842.200	8 Paket	2.200.000		8 Paket	9.842.200		0,00		0,00			PRAMBON
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket	18.300.000	7 Paket	15.672.500,00	7 Paket	28.228.850	7 Paket	18.717.279		7 Paket	28.228.850	3	1920980	3	1.920.980			PRAMBON
		Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengandaan yang Disediakan	12 Paket	2.000.000	12 Paket	1.578.715,00	2 Paket	21.800.000	12 Paket	1.728.794		2 Paket	21.800.000	2	0,00	2	0,00			PRAMBON
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	2 Dokumen	3.000.000	2 Dokumen	0,00	2 Dokumen	1.573.850	2 Dokumen	-		2 Dokumen	1.573.850	2	0,00	2	0,00			PRAMBON

		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjunga	14 Laporan	1.500.000	14 Laporan	10.120.000,00	14 Laporan	25.975.000	12 Laporan	21.917.814		14 Laporan	25.975.000	3	3000000	3	3.000.000			PRAMBON
		Penyelenggarakan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelengaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7 Laporan	22.000.000	7 Laporan	8.500.000,00	7 Laporan	54.859.000	7 Laporan	20.960.000		7 Laporan	54.859.000	2	0,00	2	0,00			PRAMBON
		Penata Usahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	10 Dokumen	1.500.000	10 Dokumen	1.353.500,00	10 Dokumen	1.522.450	10 Dokumen	-		10 Dokumen	1.522.450	3	0,00	3	0,00			PRAMBON
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**5 Paket**	**27,500,000**	**5 Paket**	0,00	5 Paket	**89.857.350**	5 Paket	104.040.509		5 Paket	**89.857.350**	-	0,00	-	0,00			PRAMBON
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Pengadaan Mebel yang Disediakan	**1 Unit**	2,500,000	**5 Unit**	0,00	1 Unit	24.330.350	5 Unit	24.250.000		1 Unit	24.330.350		0,00		0,00			PRAMBON
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	25.000.000	4 Unit	0,00	4 Unit	65.527.000	4 Unit	79.790.509		4 Unit	65.527.000	-	0,00	-	0,00			PRAMBON
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**4 Jenis**	**35.000.000**	**4 Jenis**	27.883.208,00	4 Jenis	**47.187.600**	4 Jenis	24.575.000		4 Jenis	**47.187.600**	-	**3761218**	-	3.761.218			PRAMBON
		Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	**500 Laporan**	5.000.000	**500 Laporan**	0,00	**500 Laporan**	5.112.600	12 Laporan	500.000		**500 Laporan**	5.112.600		73800		73.800			PRAMBON
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disedikan	12 Laporan	30.000.000	12 Laporan	27.883.208,00	12 Laporan	42.075.000	12 Laporan	24.075.000		12 Laporan	42.075.000	3	3687418	3	3.687.418			PRAMBON
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang terpelihara**	**39 Unit**	**157.000.000**	**39 Unit**	139.376.490,00	39 Unit	**271.152.100**	39 Unit	204.206.045		39 Unit	**271.152.100**	-	**27736782**	-	27.736.782			PRAMBON
		Penysdiaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraaan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasi atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	40.000.000	3 Unit	31.753.725,00	3 Unit	101.725.500	3 Unit	51.785.000		3 Unit	101.725.500	2	2000000	2	2.000.000			PRAMBON
		Pemeliharaan mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	25 Unit	5.000.000	25 Unit	0,00	25 Unit	12.010.400	25 Unit	11.350.000		25 Unit	12.010.400		0,00		0,00			PRAMBON
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit	20.000.000	7 Unit	23.140.000,00	7 Unit	35.400.000	15 Unit	19.259.888		7 Unit	35.400.000	5	7336782	5	7.336.782			PRAMBON
		Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantordan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	4 Unit	92.000.000	4 Unit	84.482.765,00	4 Unit	122.016.200	4 Unit	121.811.157		4 Unit	122.016.200	3	18400000	3	18.400.000			PRAMBON
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**Prosentase Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publikyang dilaksanakan dengan tertib**	**87 Persen**	**204.000.000**	**87 Persen**	64.348.100,00	87 Persen	146.899.550	87 Persen	82.756.500		87 Persen	146.899.550	35%		**0,35**				PRAMBON
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Jumlah Kegiatan Koordinasi dengan Perangkat Vertikal**	12 Kegiatan	**58,000,000**	12 Kegiatan	59.848.600,00	12 Kegiatan	**136.993.000**	29 Kegiatan	78.856.500		12 Kegiatan	**136.993.000**	3		3				PRAMBON
		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 Laporan	58,000,000	12 Laporan	59.848.600,00	12 Laporan	136.993.500	12 Laporan	78.856.500		12 Laporan	136.993.500	3		3				PRAMBON
		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	**Jumlah Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah terkait Pemeliharaan Sarana dan Prasarana**	12 Kegiatan	**6.000.000**	12 Kegiatan	3.449.500,00	12 Kegiatan	**5.925.000**	12 Dokumen	2.100.000		12 Kegiatan	**5.925.000**	3	0,00	3	0,00			PRAMBON
		Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Dearah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12 Dokumen	6.000.000	12 Dokumen	3.449.500,00	12 Dokumen	5.925.000	12 Dokumen	2.100.000		12 Dokumen	5.925.000	3	0,00	3	0,00			PRAMBON
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	**Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan**	4 Laporan	**4.000.000**	4 Laporan	1.050.000,00	4 Laporan	**3.981.050**	4 Laporan	1.800.000		4 Laporan	**3.981.050**	2	0,00	2	0,00			PRAMBON

		Pelaksanaan Urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	4.000.000	4 Laporan	1.050.000,00	4 Laporan	3.981.050	4 Laporan	1.800.000		4 Laporan	3.981.050		0,00		0,00			PRAMBON
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Prosentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif dalam Proses Pembangunan diwilayah Kecamatan Prambon**	**86 Persen**	**62.250.000**	**86 Persen**	19.922.000,00	86 Persen	61.523.561	86 Persen	106.594.750		86 Persen	61.523.561	45%	**6.860.000**	**0,45**	6.860.000			PRAMBON
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Jumlah Kegiatan pemberdayaan Desa yang dilaksanakan**	**2 Kegiatan**	**20,750,000**	**2 Kegiatan**	19.922.000,00	2 Kegiatan	61.523.561	2 Kegiatan	106.594.750		2 Kegiatan	61.523.561	2	6.860.000	2	6.860.000			PRAMBON
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	**6 Lembaga Kemasyarakatan**	11.200.000	**6 Lembaga Kemasyarakatan**	10.545.000,00	6 Lembaga Kemasyarakatan	30.735.761	6 Lembaga Ke	28.038.000		6 Lembaga Kemasyarakatan	30.735.761	6	6.860.000	6	6.860.000			PRAMBON
		Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta diwilayah Kerja Kecamatan	4 Dokumen	9.550.000	4 Dokumen	9.377.000,00	4 Dokumen	30.787.800	4 Dokumen	28.556.750		4 Dokumen	30.787.800	2	0,00	2	0,00			PRAMBON
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah masyarakat yang menerima Bantuan					250 Paket	4 Laporan		50.000.000		1.800.000,00		-		-			PRAMBON
		PROGRAM KOORDINASI KETRENTAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Prosentase Permasalahan Trantib yang ditangani**	**86 Persen**	**89.978.910**	**86 Persen**	31.286.500,00	86 Persen	51.082.000	86 Persen	42.187.000		86 Persen	51.082.000	30%	0,00	0,3	0,00			PRAMBON
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**Jumlah Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian dan TNI**	**1 Kegiatan**	**51.082.000**	**1 Kegiatan**	31.286.500,00	1 Kegiatan	**51.082.000**	1 Kegiatan	42.187.000		1 Kegiatan	**51.082.000**	1	0,00	1	0,00			PRAMBON
		Sinegritas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinegritas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	51.082.000	12 Laporan	31.286.500,00	12 Laporan	51.082.000	1 Laporan	42.187.000		12 Laporan	51.082.000	3	0,00	3	0,00			PRAMBON
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**Prosentase Lembaga/Organisasi Masyarakat yang Aktif dalam Penyelengaraan Pemerintah di Kecamatan**	**86 Persen**	**85.489.300**	**86 Persen**	23.356.500,00	86 Persen	85.489.300	86 Persen	66.350.000		86 Persen	85.489.300	30%	0,00	0,3	0,00			PRAMBON
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Jumlah Warga/Lembaga yang mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan**	**70 Orang**	**85.489.300**	**70 Orang**	23.356.500,00	**70 Orang**	**85.489.300**	75 Orang	66.350.000		**70 Orang**	**85.489.300**	-	0,00	0	0,00			PRAMBON
		Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka MemantapkanPengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	70 Orang	85.489.300	70 Orang	23.356.500,00	70 Orang	85.489.300	70 Orang	66.350.000		70 Orang	85.489.300	-	0,00	0	0,00			PRAMBON
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**Prosentase Desa/kelurahan cepat Berkembang**	**86 Persen**	**246.859.600**	**86 Persen**	140.769.659,00	86 Persen	246.859.600	86 Persen	201.496.500		86 Persen	246.859.600	35%	0,00	0,35	0,00			PRAMBON

		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah	**Jumlah kegiatan fasilitasi pembinaan pengawasan pemerintahan Desa**	**4 Kegiatan**	**246.859.600**	**4 Kegiatan**	140.769.659,00	4 Kegiatan	**246.859.600**	4 Kegiatan	201.496.500		4 Kegiatan	**246.859.600**	4	0,00	4	0,00			PRAMBON
		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	14 Dokumen	34.998.900	14 Dokumen	13.611.500,00	14 Dokumen	34.998.900	14 Dokumen	22.017.500		14 Dokumen	34.998.900	14	0,00	14	0,00			PRAMBON
		Fasilitasi Singkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	**14 Dokumen**	185.052.700	**14 Dokumen**	127.158.159,00	14 Dokumen	185.052.700	14 Dokumen	166.379.000		14 Dokumen	185.052.700	14	0,00	14	0,00			PRAMBON
		Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	**4 Laporan**	26.808.000	**4 Laporan**		4 Laporan	26.808.000	4 Laporan	13.100.000		4 Laporan	26.808.000	1		1				PRAMBON
		JUMLAH			**8.264.547.810**				**3.614.141.050**		**2.962.128.159**			**3.614.141.050**		**272.854.221**		**272.854.221**			PRAMBON

Untuk menilai keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah diukur berdasarkan capaian kinerja masing-masing indikator program dan kegiatan atas perbandingan realisasi kinerja dengan target kinerja menggunakan skala ordinal sebagai berikut:

Tabel 2.2

Kategorisasi Predikat Capaian Kinerja

No.	Interval Nilai	Predikat
1.	**≥ 91%**	Sangat Tinggi
2.	**76% ≤ 90%**	Tinggi
3.	**66% ≤ 75%**	Sedang
4.	**51% ≤ 65%**	Rendah
5.	**≤ 50%**	Sangat Rendah

Berdasarkan rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 dapat dianalisis faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebih target kinerja, implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah, serta kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.3

Analisis Faktor Penyebab, Implikasi serta Kebijakan Perencanaan dan Penganggaran

Program Perangkat Daerah	**Capaian Kinerja**	**Predikat**
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11 %	Sangat Rendah
Faktor Penyebab	Implikasi Terhadap Target Renstra PD	Kebijakan Yang Diambil
ada beberapa kegiatan kurang tepat dalam penganggaran, sehingga tidak maksimal dalam realisasinya	Terdapat risiko kurang tercapainya target kinerja	untuk kedepanya agar lebih tepat dalam penganggaran
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	10%	Sangat Rendah
Faktor Penyebab	Implikasi Terhadap Target Renstra PD	Kebijakan Yang Diambil

Kurangnya Pemahaman PPTK Dalam melaksanakan Kegiatan	Kurang dalam Capaian Kinerja	Mengarahkan PPTK untuk benar Memahai tentang Kegiatan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	9,94 %	Sangan Rendah
Faktor Penyebab	Implikasi Terhadap Target Renstra PD	Kebijakan Yang Diambil
Tidak ada kendala	Dapat memenuhi target	Agar dilaksanakan lebih tertib
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	14,98 %	Sangat Rendah
Faktor Penyebab	Implikasi Terhadap Target Renstra PD	Kebijakan Yang Diambil
Kurangnya Pemahaman PPTK Memahami Dalam melaksanakan Jadwal Kegiatan	Target tidak tercapai	Mengarahkan PPTK untuk benar Memahai tentang Kegiatan
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	0 %	Sangat Rendah
Faktor Penyebab	Implikasi Terhadap Target Renstra PD	Kebijakan Yang Diambil
Kurangnya Sumber Daya Manusia dalam memahami tugas tugas dibidangnya	Target Tidak tercapai	Memberikan bimbingan
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	3,20 %	Sangat Rendah
Faktor Penyebab	Implikasi Terhadap Target Renstra PD	Kebijakan Yang Diambil
Kurangnya Sumber Daya Manusia dalam memahami tugas tugas dibidangnya	Target Tidak tercapai	Memberikan bimbingan

Sumber : Laporan Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 Triwulan I

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Kabupaten Nganjuk berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta target kinerja pelayanan dasar sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, serta Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai dengan bisnis utama *(core bussiness)* dan indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah

Tabel 2.4
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Prambon
Kabupaten Nganjuk

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator	Kinerja Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan	Indeks sinergitas penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	80,20	0	0 %

Tabel 2.5
Indikator Kinerja Kunci Kecamatan Prambon
Kabupaten Nganjuk

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator	Kinerja Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	86	0	0%
2	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan	10	0	10%

Analisis capaian kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah Kecamatan Prambon Tahun 2025 diuraikan sebagai berikut:

A. Tujuan

Indeks Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan

Penilaian sinergitas kecamatan memperhatikan aspek :

1. Aspek Penyelanggaraan Urusan Pemerintahan Umum
2. Aspek Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan
3. Aspek Penyelenggaraan Tugas Atributif
4. Aspek Pelaksanan Tugas Delegatif
5. Aspek inovasi/ kreativitas kecamatan pada segala aspek penilaian
6. Aspek Pengelolaan Anggaran Kecamatan
7. Pelaksanaan Tugas Lainnya

Adapun indikator penilaiannya terbagi menjadi 4 (empat) komponen :

1. Kompetensi
2. Inovasi/kreatifitas
3. Kepemimpinan
4. Kinerja/Komitmen

Hasil penilaian sinergitas kecamatan Prambon adalah belum tercapai

B. Sasaran strategis yang kesatu

Indek Kepuasan Masyarakat belum terealisasi pada Tri Bulan I dikarenakan kurangnya partisipasi dari Masyarakat.

C. Sasaran strtegis yang kedua

Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di Wilayah Kecamatan, Belum tercapai dari target.

2.3. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari akademisi, kelompok masyarakat, organisasi kemasyarakatan, asosiasi dan/atau organisasi profesi, serta keterwakilan Desa dan/atau Kelurahan yang terkait langsung dengan pelayanan Kecamatan Prambon, penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD, serta hasil pengumpulan, penelitian dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan kesesuaiannya dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Prambon disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.7
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Kabupaten Nganjuk Tahun 2025

No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			NIHIL		

Sumber: Hasil Kajian Perangkat Daerah Tahun 2025

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka mendukung prioritas pembangunan daerah tahun 2025 dan pencapaian target tujuan dan sasaran Perangkat Daerah sebagaimana yang ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026, serta sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dirumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025. Selain itu, juga untuk mendukung pelayanan Perangkat Daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan.

Pencapaian Tujuan dan Sasaaran Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Untuk pencapaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026, telah dirumuskan tema RKPD Kabupatan Nganjuk Tahun 2025, yaitu ***"Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia dan Percepatan Pemulihan Ekonomi melalui Penguatan Transformasi Ekonomi Inklusif menuju Masyarakat Jawa Timur yang Adil, Sejahtera, Unggul, dan Berakhlak".***

Tema pembangunan tersebut dijabarkan dalam prioritas pembangunan antara lain :

1. Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata;
2. Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur;
3. Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan;
4. Peningkatan Kepedulian Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Lokal;
5. Peningkatan Kemandirian Pangan dan Pengelolaan Sumber Daya Energi;
6. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup;
7. Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat di Jawa Timur

3.1 Tujuan Sasaran Perangkat Daerah

Tabel 3.1
Sasaran Perangkat Daerah

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator	Kinerja Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan	Indeks sinergitas penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	80,20	0	0 %
2	Meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	86	0	0 %
3	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan	10	0	10%

3.2. Program dan Kegiatan

Dalam Perubahan Program ,Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 memedomani agenda pembangunan Nasional dan Daerah serta mempertimbangkan kondisi global saat ini.

Adapun Progran dan kegiatan beserta factor yang melatar belakangi Perubahan Rencana Kerka Perangkat Daerah Kecamatan Prambon tercantum dalam Tabel 3.2 sebagaimana berikut :

Tabel 3.2
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan dan Faktor Yang melatar belakangi Perubahan Tahun 2025

No.	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Sebelum	Sesudah	Perubahan (Bertambah/Berkurang)	Faktor Perubahan (Tambah/Kurang/Tetap/Geser)
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.868.602.231,00	2.804.163.261,58	Berkurang	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.661.250,00	5.411.250,00		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.848.400,00	1.598.400,00		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.812.850,00	3.812.850,00		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.103.341.333,00	2.103.341.333,00		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.096.404.933,00	2.096.404.933,00		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.517.600,00	3.517.600,00		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/	3.418.800,00	3.418.800,00		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	27.285.200,00	10.285.200,00		
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	17.000.000,00	0,00		
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	10.285.200,00	10.285.200,00		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	148.837.194,00	140.817.219,58		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.893.850,00	5.893.850,00		
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.847.800,00	9.847.800,00		
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	38.346.624,00	38.346.624,00		
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6.011.600,00	5.970.625,58		
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	35.952.440,00	35.952.440,00		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	49.977.180,00	41.998.180,00		
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2.807.700,00	2.807.700,00		

	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	130.445.154,00	99.276.159,00		
	Pengadaan Mebel	39.465.769,00	0,00		
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	90.979.385,00	99.276.159,00		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	47.185.000,00	47.185.000,00		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.110.000,00	5.110.000,00		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	42.075.000,00	42.075.000,00		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	397.847.100,00	397.847.100,00		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	59.674.800,00	59.674.800,00		
	Pemeliharaan Mebel	10.800.000,00	10.800.000,00		
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	47.800.000,00	47.800.000,00		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	279.572.300,00	279.572.300,00		
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	128.593.900,00	66.591.369,42	Berkurang	bergeser
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	118.687.800,00	56.685.269,42		
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	118.687.800,00	56.685.269,42		
	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	5.923.700,00	5.923.700,00		
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	5.923.700,00	5.923.700,00		
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	3.982.400,00	3.982.400,00		
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan	3.982.400,00	3.982.400,00		
3.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	66.687.950,00	64.842.950,00	tetap	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	66.687.950,00	64.842.950,00		

	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	35.900.250,00	35.900.250,00		
	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	30.787.700,00	28.942.700,00		
4.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	51.955.700,00	51.055.700,00		Bergeser
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	51.955.700,00	51.055.700,00		
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	51.955.700,00	51.055.700,00		
5.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	86.545.350,00	86.545.350,00		tetap
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	86.545.350,00	86.545.350,00		
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun	86.545.350,00	86.545.350,00		
6.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	246.833.200,00	226.208.200,00		Tetap
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	246.833.200,00	226.208.200,00		
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	34.998.900,00	34.998.900,00		
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	185.034.200,00	164.409.200,00		
	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	26.800.100,00	26.800.100,00		
	JUMLAH	3.449.218.331,00	3.299.406.831,00	Berkurang	

3.3 Perubahan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk Tahun 2025

Adapun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 adalah sebagaimana tersebut :

Tabel 3.3
Matrik Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 - Kecamatan Prambon
(Sebagai Berikut

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025
KECAMATAN PRAMBON KAB. NGANJUK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		KECAMATAN PRAMBON							3.814.141.060,00	3.449.218.331,00	3.307.027.898,00	-507.113.162,00							3.445.419.138,42	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							3.814.141.060,00	3.449.218.331,00	3.307.027.898,00	-507.113.162,00							3.445.419.138,42	
	7.01	KECAMATAN							3.814.141.060,00	3.449.218.331,00	3.307.027.898,00	-507.113.162,00							3.445.419.138,42	
1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMBRINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Kecamatan				81 Nilai	81 Nilai	3.003.274.960,00	2.868.802.231,00	2.811.784.328,58	-76.469.431,00							2.926.808.819,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Pengenggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan, Pengenggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun*				3 Dokumen	3 Dokumen	13.661.250,00	13.661.250,00	5.411.250,00	-8.250.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP 8 Prov: Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Masyarakat Kecamatan Prambon		13.574.139,00	KECAMATAN PRAMBON
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	9.848.400,00	9.848.400,00	1.598.400,00	-8.250.000,00	Kab. Nganjuk, Prambon, Bemus Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP 8 Prov: Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik			9.947.050,00	KECAMATAN PRAMBON
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	3.812.650,00	3.812.650,00	3.812.650,00	0,00	Kab. Nganjuk, Prambon, Bemus Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP 8 Prov: Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik			3.927.089,00	KECAMATAN PRAMBON
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				44 Dokumen	44 Dokumen	2.043.324.123,00	2.103.341.333,00	2.110.982.400,00	67.658.277,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP 8 Prov: Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Masyarakat Kecamatan Prambon		2.110.982.400,00	KECAMATAN PRAMBON
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				22 Orang/bulan	22 Orang/bulan	2.036.387.723,00	2.096.404.933,00	2.104.026.000,00	67.638.277,00	Kab. Nganjuk, Prambon, Bemus Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP 8 Prov: Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik			2.104.026.000,00	KECAMATAN PRAMBON
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				4 Laporan	4 Laporan	3.517.600,00	3.517.600,00	3.517.600,00	0,00	Kab. Nganjuk, Prambon, Bemus Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP 8 Prov: Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik			3.517.600,00	KECAMATAN PRAMBON
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				5 Laporan	5 Laporan	3.418.800,00	3.418.800,00	3.418.800,00	0,00	Kab. Nganjuk, Prambon, Bemus Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP 8 Prov: Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik			3.418.800,00	KECAMATAN PRAMBON
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				2 kegiatan	2 kegiatan	31.744.000,00	27.285.200,00	10.285.200,00	-21.458.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP 8 Prov: Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Masyarakat Kecamatan Prambon		14.880.000,00	KECAMATAN PRAMBON
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				17 Paket	0 Paket	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	-17.000.000,00	Kab. Nganjuk, Prambon, Bemus Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP 8 Prov: Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik			0,00	KECAMATAN PRAMBON
	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Terlaksankan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				40 Orang	40 Orang	14.744.000,00	10.285.200,00	10.285.200,00	-4.458.800,00	Kab. Nganjuk, Prambon, Bemus Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP 8 Prov: Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik			14.880.000,00	KECAMATAN PRAMBON

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Berlambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah*				187 Dokumen	187 Dokumen	164.466.696,00	148.637.104,00	140.817.219,58	-23.871.476,42			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP 8 Prov: Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Masyarakat Kecamatan Prambon		166.236.074,00	KECAMATAN PRAMBON
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	5.893.850,00	5.893.850,00	5.893.850,00	0,00	Kab. Nganjuk, Prambon, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP 8 Prov: Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik			5.894.400,00	KECAMATAN PRAMBON
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				8 Paket	8 Paket	9.847.800,00	9.847.800,00	9.847.800,00	0,00	Kab. Nganjuk, Prambon, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP 8 Prov: Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik			9.843.200,00	KECAMATAN PRAMBON
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	38.213.128,00	39.346.624,00	38.346.624,00	133.496,00	Kab. Nganjuk, Prambon, Semua Kel/Desa Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP 8 Prov: Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik			39.346.624,00	KECAMATAN PRAMBON
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	21.796.600,00	6.011.600,00	5.970.625,58	-15.825.974,42	Kab. Nganjuk, Prambon, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP 8 Prov: Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik			21.795.600,00	KECAMATAN PRAMBON
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	35.952.440,00	35.952.440,00	35.952.440,00	0,00	Kab. Nganjuk, Prambon, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP 8 Prov: Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik			35.974.800,00	KECAMATAN PRAMBON
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				7 Laporan	7 Laporan	49.977.160,00	49.977.160,00	41.998.160,00	-7.979.000,00	Kab. Nganjuk, Prambon, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP 8 Prov: Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik			50.859.000,00	KECAMATAN PRAMBON
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	2.807.700,00	2.807.700,00	2.807.700,00	0,00	Kab. Nganjuk, Prambon, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP 8 Prov: Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik			5.623.450,00	KECAMATAN PRAMBON
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disediakan*				5 paket	5 paket	254.726.179,00	130.445.154,00	99.276.159,00	-155.450.020,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP 8 Prov: Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Masyarakat Kecamatan Prambon		99.276.159,00	KECAMATAN PRAMBON
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	0 Unit	39.465.769,00	39.465.769,00	0,00	-39.465.769,00	Kab. Nganjuk, Prambon, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP 8 Prov: Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik			0,00	KECAMATAN PRAMBON
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	215.260.410,00	99.979.585,00	99.276.159,00	-116.984.251,00	Kab. Nganjuk, Prambon, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP 8 Prov: Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi PB Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik			99.276.159,00	KECAMATAN PRAMBON
	7.01.01.2.06	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				4 jenis	4 jenis	47.185.000,00	47.185.000,00	47.185.000,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP 8 Prov: Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi PB Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Masyarakat Kecamatan Prambon		47.187.600,00	KECAMATAN PRAMBON
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0 Laporan	2 Laporan	5.110.000,00	5.110.000,00	5.110.000,00	0,00	Kab. Nganjuk, Prambon, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP 8 Prov: Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi PB Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik			5.112.600,00	KECAMATAN PRAMBON
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	42.075.000,00	42.075.000,00	42.075.000,00	0,00	Kab. Nganjuk, Prambon, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP 8 Prov: Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi PB Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik			42.075.000,00	KECAMATAN PRAMBON
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah barang milik daerah pada perangkat daerah yang terpelihara*				39 unit	39 unit	448.145.700,00	397.847.100,00	397.847.100,00	-50.298.600,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP 8 Prov: Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi PB Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Masyarakat Kecamatan Prambon		472.368.147,00	KECAMATAN PRAMBON
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit	10 Unit	59.674.800,00	59.674.800,00	59.674.800,00	0,00	Kab. Nganjuk, Prambon, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP 8 Prov: Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi PB Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik			59.674.800,00	KECAMATAN PRAMBON
	7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				12 Unit	12 Unit	22.000.000,00	10.800.000,00	10.800.000,00	-11.200.000,00	Kab. Nganjuk, Prambon, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP 8 Prov: Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi PB Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik			22.013.000,00	KECAMATAN PRAMBON
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang DipeNara				10 Unit	10 Unit	47.800.000,00	47.800.000,00	47.800.000,00	0,00	Kab. Nganjuk, Prambon, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP 8 Prov: Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi PB Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik			50.000.000,00	KECAMATAN PRAMBON
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	4 Unit	316.670.900,00	279.572.300,00	279.572.300,00	-39.398.600,00	Kab. Nganjuk, Prambon, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP 8 Prov: Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi PB Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik			340.704.347,00	KECAMATAN PRAMBON
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	persentase kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan dengan tertib				99 %	99 %	169.843.900,00	128.693.900,00	66.691.369,42	-62.262.530,58							66.691.369,42	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah Kegiatan koordinasi dapan perangkat vertikal*				12 kegiatan	12 kegiatan	148.937.800,00	118.687.800,00	56.655.269,42	-92.282.530,58			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP 8 Prov: Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi PB Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Masyarakat Kecamatan Prambon		56.655.269,42	KECAMATAN PRAMBON
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				12 Laporan	12 Laporan	148.937.800,00	118.687.800,00	56.655.269,42	-92.282.530,58	Kab. Nganjuk, Prambon, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP 8 Prov: Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi PB Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik			56.655.269,42	KECAMATAN PRAMBON

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2025	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	*Jumlah kegiatan koordinasi / sinergi dengan perangkat daerah terkait Pemeliharaan sarana dan prasarana*				12 kegiatan	12 kegiatan	5.923.700,00	5.923.700,00	5.923.700,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP & Prov: Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi PS Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Masyarakat Kecamatan Prambon		5.925.000,00	KECAMATAN PRAMBON
	7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				12 Dokumen	12 Dokumen	5.923.700,00	5.923.700,00	5.923.700,00	0,00	Kab. Nganjuk, Prambon, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP & Prov: Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi PS Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik			5.925.000,00	KECAMATAN PRAMBON
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Jumlah laporan pelaksanaan kewenangan lain yang dilimpahkan*				4 laporan	4 laporan	3.982.400,00	3.982.400,00	3.982.400,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP & Prov: Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi PS Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Masyarakat Kecamatan Prambon		3.982.000,00	KECAMATAN PRAMBON
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				4 Laporan	4 Laporan	3.982.400,00	3.982.400,00	3.982.400,00	0,00	Kab. Nganjuk, Prambon, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP & Prov: Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi PS Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik			3.982.000,00	KECAMATAN PRAMBON
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase lembaga kemasyarakatan Desa/kelurahan yang aktif dalam proses pembangunan di kecamatan				**97 %**	**97 %**	**66.687.950,00**	**66.687.950,00**	**64.842.950,00**	**100,00**							**66.689.080,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Jumlah kegiatan pemberdayaan Desa yang dilaksanakan*				2 kegiatan	2 kegiatan	66.687.950,00	66.687.950,00	64.842.950,00	-1.845.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP & Prov: Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi PS Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Masyarakat Kecamatan Prambon		66.665.050,00	KECAMATAN PRAMBON
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	35.900.250,00	35.900.250,00	35.900.250,00	0,00	Kab. Nganjuk, Prambon, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP & Prov: Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi PS Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik			35.903.250,00	KECAMATAN PRAMBON
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah clin Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				4 Dokumen	4 Dokumen	30.787.700,00	30.787.700,00	28.942.700,00	-1.845.000,00	Kab. Nganjuk, Prambon, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP & Prov: Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi PS Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik			30.787.800,00	KECAMATAN PRAMBON
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase permasalahan ketenteraman dan ketertiban umum yang ditangani				**97 %**	**97 %**	**51.955.700,00**	**51.955.700,00**	**51.055.700,00**	**0,00**							**51.955.700,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Jumlah Kegiatan sinergitas dengan kepolisian dan TNI*				1 kegiatan	1 kegiatan	51.955.700,00	51.955.700,00	51.055.700,00	-900.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP & Prov: Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi PS Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Masyarakat Kecamatan Prambon		51.953.700,00	KECAMATAN PRAMBON
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	51.955.700,00	51.955.700,00	51.055.700,00	-900.000,00	Kab. Nganjuk, Prambon, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP & Prov: Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi PS Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik			51.955.700,00	KECAMATAN PRAMBON
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Persentase lembaga/organisasi masyarakat yang aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan				**97 %**	**97 %**	**86.545.350,00**	**86.545.350,00**	**86.545.350,00**	**0,00**							**86.545.350,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Jumlah Lembaga/Organisasi Masyarakat yang aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan*				70 orang	70 orang	86.545.350,00	86.545.350,00	86.545.350,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP & Prov: Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi PS Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Masyarakat Kecamatan Prambon		86.545.350,00	KECAMATAN PRAMBON

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)						PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia				70 Orang	70 Orang	86.545.350,00	86.545.350,00	86.545.350,00	0,00	Kab. Nganjuk, Prambon, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP 8 Prov: Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik			86.545.350,00	KECAMATAN PRAMBON
6	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa/kelurahan cepat berkembang				87 %	87 %	246.833.200,00	246.833.200,00	226.208.200,00	0,00							246.833.200,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Jumlah kegiatan fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa*				4 kegiatan	4 kegiatan	246.833.200,00	246.833.200,00	226.208.200,00	-20.625.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP 8 Prov: Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Masyarakat Kecamatan Prambon		246.833.200,00	KECAMATAN PRAMBON
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				14 Dokumen	14 Dokumen	34.998.900,00	34.998.900,00	34.998.900,00	0,00	Kab. Nganjuk, Prambon, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP 8 Prov: Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik			34.998.900,00	KECAMATAN PRAMBON
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Desa dengan Pembangunan Desa																		
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				14 Dokumen	2 Dokumen	185.034.200,00	185.034.200,00	164.409.200,00	-20.625.000,00	Kab. Nganjuk, Prambon, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP 8 Prov: Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik			185.034.200,00	KECAMATAN PRAMBON
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				4 Laporan	4 Laporan	26.809.100,00	26.809.100,00	26.809.100,00	0,00	Kab. Nganjuk, Prambon, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP 8 Prov: Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik			26.809.100,00	KECAMATAN PRAMBON
		JUMLAH							3.914.141.080,00	3.449.218.331,80	3.307.027.998,00	-397.113.162,00							3.445.419.138,42	

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Kecamatan Prambon sebagaimana tercantum dalam Perubahan RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025.

Dalam pelaksanaan Perubahan Renja Kecamatan Prambon Tahun 2025 diharapkan memperhatikan keselarasan dan konsistensi Renstra Kecamatan Prambon Tahun 2024-2026, sehingga target kinerja tahun 2025 dapat dicapai dengan optimal.

4.1. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk Tahun 2025, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Kecamatan Prambon dengan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah sebagai implementasi pelaksanaan RPD dan Renstra Kecamatan Prambon yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026.

Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk, menetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh unit kerja pada Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:
   a. melaksanakan Perubahan Renja Kecamatan Prambon Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
   b. melakukan pemantauan dan supervisi terhadap penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Kecamatan Prambon, untuk memastikan bahwa program dan kegiatan, lokasi, pagu indikatif dan indikator kinerja, serta kelompok sasaran sesuai dengan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Prambon; dan
   c. menjaga konsistensi antara Perubahan RKPD, Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Prambon dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Kecamatan Prambon.

2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Perubahan Renja Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk Tahun 2025; dan
3. Perubahan Renja Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, adapun langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi, efektivitas dan efesiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Nganjuk.

4.2. Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Perubahan Renja Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk Tahun 2025, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Kecamatan Prambon dengan berpedoman pada Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2025.

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001